

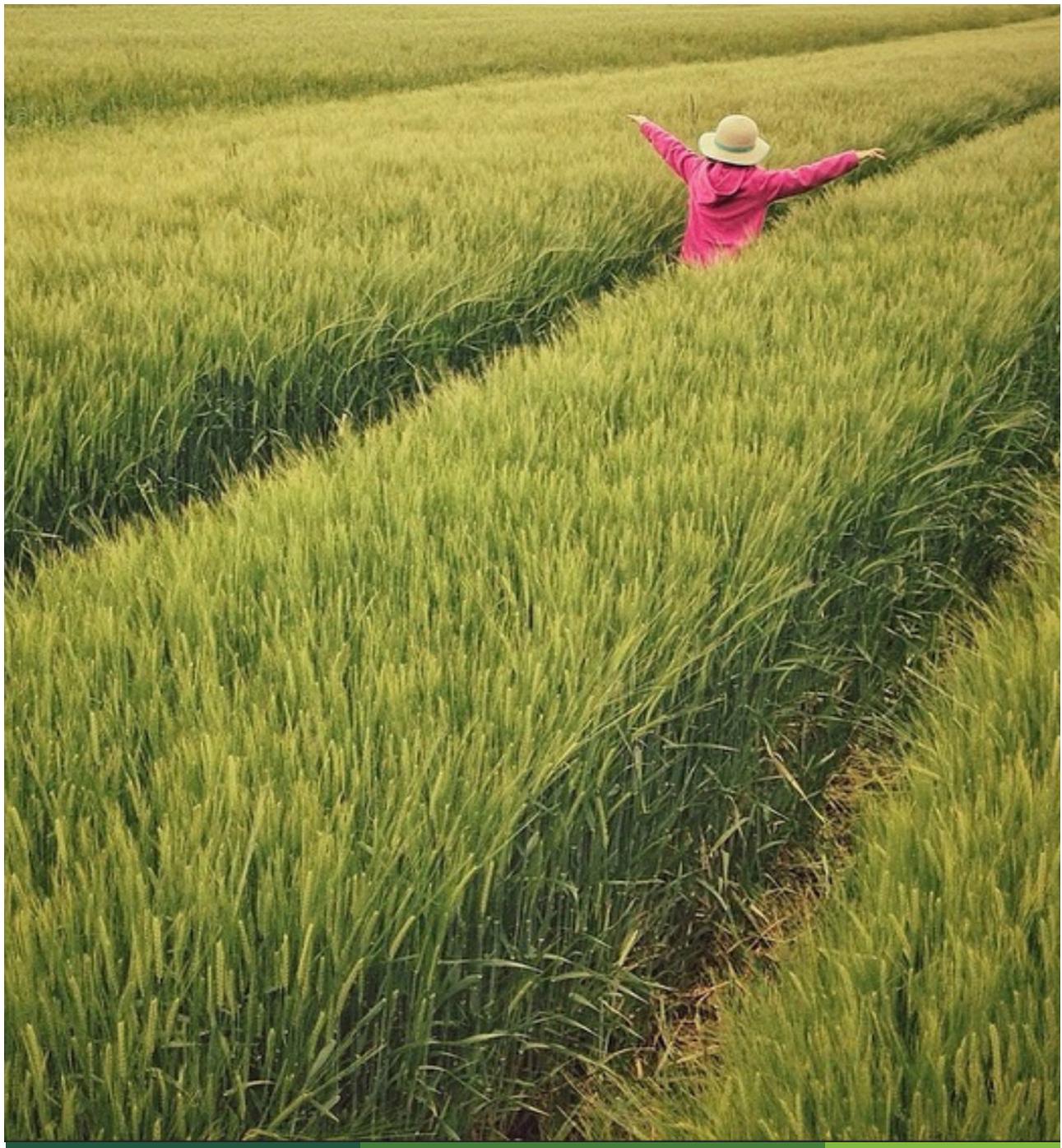


PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO 24

**MAR
2022**



Special Edition: **Building Sustainable Ecosystem in Challenging Times**

Contact Us: contact@pisagro.org www.pisagro.org [@pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat) PISAgro



Daftar Isi

03 Kata Pengantar *Opening Remarks*

04 Tentang PISAgro *About PISAgro*

06 Cerita Utama *Cover Story*

- 06 Membentuk Ekosistem untuk Menghadapi Perubahan Iklim
09 Building Ecosystems to Face the Climate Change

11 Fitur *Features*

- 11 Menghadirkan Petani dalam Investasi Berkelanjutan Pertanian
14 Engaging Farmers in Agricultural Sustainable Investment

17 Sorotan *Highlights*

21 Profil *Profile*

- 21 Arief P. Rachmat: Peranan Business 20/B20 dalam Presidensi G20 serta Perspektif dan Strategi Swasta dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
23 Arief P. Rachmat: Sharing Perspectives and Strategies for Business 20 (B20) Role in G20 Presidency and Private Sector's Support Towards Food Security and Farmers' Welfare

25 Webinar

- 25 Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025
27 Increasing Domestic Milk Production through the Development of Jersey Cattle to Support the Achievement of the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint

29 WG Story

- 29 Save The Children Indonesia Mengadakan Side Event C20 Kick-Off Meeting: Seruan Kepada Para Pemimpin Dunia Tentang Masa Depan Anak-anak yang Terancam
31 Save the Children Indonesia Hosted A Side Event of the C20 Kick-off Meeting: The Call to Global Leaders About the Children's Future At Risk

Tim Editorial

KONTEN

Ferial Lubis
Radyani Prasasya
Hendri Surya Widcaksana

DESAIN & LAYOUT

Robiah Nur Fauziah

KONTRIBUTOR FOTO

Tim PISAgro

Kata Pengantar



Insan Syafaat
Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang terhormat,

Kita berjumpa kembali di PISAgro News edisi Maret 2022. Kita baru saja memulai 3 bulan pertama dengan semangat dan harapan baru di tahun 2022.

Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi sedikit mengenai harapan kami kepada para pembaca. Sebagaimana yang kita semua ketahui, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang dimana kita semua, termasuk para petani, menyambutnya dengan suka cita. Dan Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, serta mendefinisikan ulang cita-cita dan harapan kita di masa mendatang.

Di tahun ini, kita mendapat kehormatan untuk memegang tampuk presidensi G20 yang dimana tahun ini, kita mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang resilien terhadap tantangan global saat ini, termasuk isu perubahan iklim. Dan, sudah ada beberapa acara yang diselenggarakan secara hibrid (daring dan luring) oleh kelompok-kelompok kerja G20, yakni Youth 20/Y20, Urban 20/U20, serta Business 20/B20, dengan beragam topik,

salah satunya adalah investasi berkelanjutan. Dalam nawala (newsletter) kali ini, kami akan membahas mengenai pentingnya peran petani sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam investasi berkelanjutan pertanian, serta pembentukan ekosistem multisektor guna menghadapi perubahan iklim.

Pada edisi kali ini, kami juga mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arif P. Rachmat, untuk mengenal lebih dalam seputar perspektif dari pihak swasta terhadap presidensi Indonesia di KTT G20 dan kelompok kerjanya (termasuk Business 20/B20) dan kemajuan ekonomi di sektor pangan dan agribisnis, serta mengetahui strategi dari pihak swasta dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas dukungan yang telah diberikan sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus melakukan kegiatan kami. Selamat membaca, dan kami harap nawala (newsletter) ini dapat memberikan perspektif baru untuk anda. Tak lupa juga, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang menjalankan, serta kami berpesan untuk tetap jaga kesehatan dan terus semangat dalam menjalani hari-hari di bulan suci ini.

Opening Remarks

To our distinguished readers,

We meet again in the newest PISAgro News edition. We have just started the first three months in 2022 with vigor and new expectations.

In this opportunity, we would like to share a bit about our wishes to the readers. As you all may know, we are entering the holy month of Ramadan where all of us, including our nation's farmers, are welcoming it with joy. This Ramadan could be a chance for us to reflect the things we have achieved, as well as to redefine our goals for the future.

This year Indonesia received the honor to host the G20 meeting, which uses "Recover Together, Recover Stronger" as its theme. This jargon aligns with Indonesia's commitment towards the economic recovery efforts as well as to promote a resilient and sustainable development to answer global challenges, which also includes climate changes.

The G20 working groups have organized several events to answer this challenge, such as the Youth 20 (Y20), Urban 20 (U20), and Business 20 (B20), all of which discuss a wide array of topics, including sustainable investment.

In this edition we are inviting you to discuss the importance of farmers' role as the main stakeholder in sustainable investment for agriculture as well as to develop a multisector ecosystem to face the climate change.

We also received the opportunity to talk with the Vice Chairman of Agriculture Department in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Arif P. Rachmat, to learn more about the private sector's perspective towards Indonesia's role in the G20 Presidency as well as its working groups. He will also share to us about his insight regarding the economic improvement in the food and agribusiness sectors, and helped us to learn more about the private sector's strategy to support food security and farmers' welfare.

We would also like to send our gratitude to each and every one of you for your utmost support so that the PISAgro Secretariat could continue our activities. We hope that you will have a good time reading this newsletter and gain new insights from it.

Last but not least, Eid Mubarak to those who participated in fasting during this Ramadan. Remember to take care of your health and keep your spirit up during this holy month.



Kelompok Kerja

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke hilir dan menyusun rencana kerja yang meliputi kebutuhan permodalan, target produksi, target pembelian, target pelatihan petani, hingga waktu pelaksanaannya. Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai proyek percontohan, mulai dari pelatihan petani mengenai pengelolaan kebun yang baik hingga membuka ketersediaan akses keuangan dan jaminan pembelian.

	Agrifinance & TIK		Kelapa Sawit
	Kakao		Kentang
	Kopi		Karet
	Jagung		Kedelai
	Susu		Padi
	Hortikultura		Sapi Potong
	Vokasi/Kejuruan		

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat

Direktur Eksekutif

Ken Swari Maharani

Manajer Pelibatan Strategis

Hendri Surya Widcaksana

Manajer Komunikasi dan Media Sosial

Nadia Fairus

Manajer Perkantoran

Ferial Lubis

Konsultan

Fathan Oktrisaf

Manajer Proyek

Working Groups

Every working group is required to develop their chain supply from their downstream line to the upstream as well as formulating a working plan which includes capital needs, production target, purchasing order target, farmers' training, as well as their training schedules. Every supply chain is also required to carry out various pilot projects, ranging from farmers' training on proper plantation management methods to enabling financial access and purchase protection.

	Agrifinance & ICT		Palm Oil
	Cocoa		Potato
	Coffee		Rubber
	Corn		Soy
	Dairy		Rice
	Horticulture		Cattle
	Vocational Education		

PISAgro Secretariat

Insan Syafaat

Executive Director

Ken Swari Maharani

Strategic Engagement Manager

Hendri Surya Widcaksana

Communication and Social Media Manager

Nadia Fairus

Office Manager

Ferial Lubis

Consultant

Fathan Oktrisaf

Project Management Officer

Cerita Utama

Membentuk Ekosistem untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Radyani Prasasya



Setalah pandemi Covid-19 diprediksi beralih menjadi endemi sehingga mendorong gaya hidup normal baru (*new normal*), Indonesia masih harus menghadapi tantangan berskala global lainnya yaitu perubahan iklim dan dampaknya. Pembahasan terkait perekonomian saat ini tidak hanya membahas pembangunan pasca-pandemi, tetapi juga perekonomian yang ramah lingkungan dan bisa berjalan bersamaan dengan aksi perubahan iklim.

DBS Asian Insight Conference adalah kegiatan tahunan DBS yang bertujuan mempertemukan para pemimpin dan para ahli untuk mendiskusikan dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu global. AIC tahun ini mengangkat tema “*Economy and Environment: Towards a Revolutionary Future*”. Sesi panel ketiga pada Selasa (22/3) dengan sub-topik “*Small Steps to Greener Future*” menghadirkan Laksmi Dhewanthi, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK sebagai pembicara kunci. Hadir pula Ketua Komite Tetap Energi Baru & Terbarukan KADIN Muhammad Yusrizki, Executive Director PISAgro Insan Syafaat, dan Head of Corporate Strategy PT TBS Energi Utama Tbk Nafi Achmad sebagai panelis.

Sebagai salah satu perwakilan Indonesia dalam COP26 Glasgow 2021, Ibu Laksmi menyampaikan kesepakatan negara-negara untuk berkomitmen menekan kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari satu setengah derajat celcius serta rencana net zero emission pada 2050. Agenda pembahasan COP26 mencakup pembahasan energi bersih, berbagai strategi berbagai negara termasuk Indonesia, serta bahasan kerentanan pertanian terhadap perubahan iklim yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia.

Pertanian dan Perubahan Iklim

Sektor pertanian begitu dekat dengan isu perubahan iklim mengingat produksi pangan sangat rentan terhadap perubahan iklim serta sekaligus sebagai salah satu kontributor bagi perubahan iklim. Sistem produksi pangan yang berkelanjutan yang disoroti oleh COP26 meliputi perbaikan pengelolaan tanah dan hara, pengelolaan peternakan, sosial ekonomi pertanian, ketahanan pangan, dan penguatan kebijakan di bidang terkait. Misalnya manajemen tanah dan hara yang baik terutama dengan penggunaan bahan-bahan organik diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tanah dan

menjamin ketahanan pangan, namun juga berkontribusi mengurangi emisi GRK dan penurunan tingkat pencemaran tanah.

"PISAgro lahir dari komitmen terkait isu food security di mana di dalamnya ada aspek keberlanjutan yang erat dengan perlindungan lingkungan dan iklim," jelas Bapak Insan Syafaat.

Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) sebagai asosiasi sektor spesifik pertanian bertujuan menciptakan model kemitraan yang merangkul petani untuk menerapkan kegiatan pertanian yang lebih berkelanjutan. Model yang dinamai inclusive closed-loop ini menggandeng industri, pemerintah, lembaga keuangan, dan pendidikan untuk membentuk suatu ekosistem yang memfasilitasi akses petani terhadap sistem yang berkelanjutan serta memberikan edukasi dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Modernisasi pola pikir dan introduksi teknologi juga menjadi kunci untuk perkembangan pertanian yang lebih baik secara ekonomi dan berkontribusi bagi pencegahan perubahan iklim.

Dalam sesi AIC juga dibahas faktor-faktor pendukung dalam pembentukan ekosistem ini, salah satunya adalah kebutuhan adanya enabling condition atau kondisi pemungkin dalam bentuk kebijakan pendukung. Kebijakan yang diharapkan tidak hanya bantuan legalitas, kepastian harga, insentif, serta kebijakan lain yang mendukung pertumbuhan teknologi dan pencerdasan SDM. Sehingga seluruh pemangku kepentingan harus sama-sama bergerak membentuk ekosistem.

Dalam sektor pertanian, misalnya terkait dengan pertanian organik yang digadang-gadang ramah lingkungan. Petani membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk pelatihan, bantuan sertifikasi, serta dukungan implementasi organik di lahan. Irigasi yang bersih dan bebas pencemaran sebagai syarat sertifikasi lahan organik seringkali berada di luar kapasitas petani, bukan mereka yang mencemari aliran air. Maka diperlukan kerja

sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menjaga dan menjamin aliran irigasi pertanian yang ramah bagi petani organik. Dari sisi pupuk, pupuk kendang memang lebih murah dibandingkan pupuk kimia, tetapi dibutuhkan jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian dengan pupuk organik. Maka dibutuhkan juga ekosistem suplai pupuk organik yang baik. Teknologi serta pengembangan produk organik juga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan petani menjaga lahan dari hama dan meningkatkan produktivitas tanpa bahan kimia sintetis.

Dengan ekosistem seputar pertanian organik baik dari segi pemodal, pelatihan, bantuan konservasi lingkungan, teknologi, serta akses pasar diharapkan meningkatkan jumlah petani organik dan petani berkelanjutan lainnya untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Ekosistem Multisektor yang Berkelanjutan Berjalan Beriringan

Ambisi penurunan emisi melalui pembentukan ekosistem sebenarnya merupakan tindakan multisektor. Sebagaimana contoh sebelumnya bahwa pencemaran industri lain secara tidak langsung mengganggu sektor pertanian organik, maka ekosistem berkelanjutan dari multisektor mesti berjalan beriringan.

KADIN melalui platform *Net Zero Hub* berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi terstandar untuk membuat panduan dan program yang mendukung ekosistem *Net Zero* di Indonesia bagi industri-industri multisektor.

Di sektor energi, PT TBS salah satunya, sudah melihat jauh ke depan untuk mempersiapkan perubahan dari batu bara ke energi baru terbarukan. Bapak Nafi Achmad menyebutkan, TBS sudah memproyeksikan 80% pemasukan perusahaan beralih menjadi *green business* pada tahun 2025 dan diharapkan menjadi *carbon neutral* pada 2030. Komitmen ini tidak hanya akan berpengaruh besar bagi

perusahaan, tetapi bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, membuktikan bahwa dalam ekosistem seluruh pihak saling memengaruhi.

“Sesuai yang disampaikan Bapak Yusrizki, [di] masa depan, [tindakan net zero] tidak hanya untuk dekarbonisasi negara kita saja, tapi [dapat berdampak] lebih luas ambisinya untuk dekarbonisasi Asia, dan kita berpeluang menjadi aktor kunci dekarbonisasi global. Satu hal yang menjadi kesamaan [pendapat] para narasumber adalah sebetulnya [ekosistem bisnis yang ramah lingkungan] ini menguntungkan, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan untung ruginya,” ucap Ibu Gita Syahrani selaku moderator AIC sesi ketiga menutup acara.

Cover Story

Building Ecosystems to Face the Climate Change

Radyani Prasasya

After the Covid-19 pandemic is expected to turn into an endemic, thus encouraging a new normal lifestyle, Indonesia still has to face other global-scale challenges, namely climate change and its impacts. Discussions related to the current economy conditions is not only limited to discussing post-pandemic development, but also the economy that is environmentally friendly and able to go hand in hand with climate change action.

The DBS Asian Insight Conference (AIC) is an annual DBS event that aims to bring together leaders and experts to discuss and share their views on global issues. This year's AIC brought up the theme "Economy and Environment: Towards a Revolutionary Future". The third panel session on Tuesday (22/3) with the sub-topic "Small Steps to Greener Future" presented Laksmi Dwanthi, Director General of Climate Change Control at the Ministry of Environment and Forestry as the keynote speaker. Also present were the Chairman of the Standing Committee on New & Renewable Energy KADIN Muhammad Yusrizki, Executive Director of PISAgro Insan Syafaat, and Head of Corporate Strategy of PT TBS Energi Utama Tbk Nafi Achmad as panelists.

As Indonesia's representative at COP26 Glasgow 2021, Ms. Laksmi conveyed the agreement of countries to commit to reducing the increase in global average temperature by no more than one and a half degrees Celsius and plans for net zero emissions by 2050. The agenda for the discussion of COP26 includes discussions on clean energy, various the strategies of various countries including Indonesia, as well as the discussion of agricultural vulnerability to climate change which is very relevant to Indonesian conditions.

Agriculture and Climate Change

The agricultural sector is very closely related to climate change issue considering that food production is very vulnerable to climate change as well as being one of the contributors to climate change itself. Sustainable food production systems highlighted by COP26 include improving soil and nutrient management, livestock management, agricultural socio-economics, food security, and strengthening policies in related fields. For instance, good soil and nutrient management, especially with the use of organic materials, is expected to not only improve soil quality and ensure food security but also contribute to reducing GHG emissions and reducing soil pollution levels.

"PISAgro was founded from a commitment related to food security issues in which there is a sustainability aspect that is closely related to environmental and climate protection," explained Mr. Insan Syafaat.

The Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) as an agricultural sector association aims to create a partnership model that embraces farmers to implement more sustainable agricultural practices. The model, called the inclusive closed-loop, collaborates with industry, government, financial institutions, and education to form an ecosystem that facilitates farmers' access to a sustainable system and provides education and training according to the needs of the times. The modernization of the mindset and the introduction of technology are also the key to the development of a better agricultural economy and contribute to the prevention of climate change.



The AIC session also discussed supporting factors in the formation of this ecosystem, one of which is the need for enabling conditions in the form of supporting policies. The policies that are expected are not only legal assistance, price certainty, incentives, and other policies that support technology growth and human resource development. So that all stakeholders must work together to form an ecosystem.

In the agricultural sector, for example, organic agriculture which is predicted to be environmentally friendly. Organic farmers need support from many parties for training, certification assistance, as well as support for organic implementation on the farmland. Clean and pollution-free irrigation as a requirement for organic farmland certification is often beyond the capacity of farmers as they are not the one who pollute waterways. Therefore, cooperation and support from various parties are needed to help maintain and ensure the flow of agricultural irrigation that is friendly to organic farmers. In terms of fertilizers, manure fertilizer is indeed cheaper than chemical fertilizers, but it takes a very large amount to meet the needs of the land size. Therefore, a good organic fertilizer supply ecosystem is also needed. Technology and the development of organic products are also expected to make it easier for farmers to protect their land from pests and increase productivity without synthetic chemicals.

With the ecosystem surrounding organic farming, both in terms of capital, training, environmental conservation assistance, technology, and market access, it is hoped that the number of organic farmers and other sustainable farmers will increase for more environmentally friendly agriculture.

Sustainable Multisectoral Ecosystems Go Hand in Hand

The ambition to reduce emissions through the formation of sustainable ecosystems should actually be a multi-sectoral action. As the previous example that pollution from other industries indirectly disrupts the organic farming sector, a sustainable ecosystem from multi-sector must go hand in hand.

KADIN through the Net Zero Hub platform collaborates with various parties such as standardized organizations to create guidelines and programs that support the Net Zero ecosystem in Indonesia for multi-sector industries.

In the energy sector, PT TBS is one of them, already looking far ahead to prepare for the change from coal to new and renewable energy. Mr. Nafi Achmad said, TBS has projected that 80% of the company's income will turn into a green business by 2025 and is expected to become carbon neutral by 2030. This commitment will not only have a major impact on the company, but also for the environment and the surrounding community, proving that in the ecosystem all parties influence each other.

"As stated by Mr. Yusrizki, [in] the future, [net zero actions] are not only for the decarbonization of our country, but [could have an impact] on its wider ambition to decarbonize Asia, and we have the opportunity to become a key actor in global decarbonization. One thing that the speakers [opinions] have in common is that this [environmentally friendly business ecosystem] is profitable, not something that should be debated on the pros and cons," said Ms. Gita Syahrani as moderator of the third session of AIC closing the panel.

Fitur

Menghadirkan Petani dalam Investasi Berkelanjutan Pertanian

Radyani Prasasya



Petani adalah stakeholder penting dalam investasi di sektor pertanian

Menilik besarnya kontribusi sektor pertanian bagi sektor perekonomian yang tidak hanya terbatas pada sumbangannya bagi PDB, tetapi juga ketahanan pangan Indonesia, sektor pertanian layak menjadi salah satu pusat perhatian. Untuk terus mendorong perkembangan dan meningkatkan daya saing pertanian Indonesia, investasi dianggap sebagai langkah yang strategis. Sebagai sektor yang terus tumbuh meskipun diterjang pandemi, Badan Pusat Statistik kembali mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian secara positif di periode Januari-Februari 2022. Pertumbuhan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti dan jalan di tempat, namun terus tumbuh dengan didukung salah satunya melalui investasi.

Investasi PMA di sektor pertanian tercatat hanya sebesar 3-7% dari total investasi menurut data *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS). Sebagian besar baru masuk pada sektor kelapa sawit saja, sehingga menunjukkan banyak komoditas-komoditas dan pintu di sektor pertanian yang belum tersentuh investasi.

AMM G20 Italia menyuarakan dorongan untuk sistem pangan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan termasuk untuk Kawasan Afrika. Dengan isu perubahan iklim, bencana alam, dan pangan diperburuk munculnya pandemi yang semakin membatasi dan memberatkan kondisi. Indonesia dalam presidensinya akan juga memberikan perhatian khusus untuk mendorong G20 memberikan perhatian khusus bagi Afrika untuk mencapai target penghapusan kelaparan.

Investasi Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hadir menjadi salah satu dorongan bagi perubahan perilaku menjadi lebih etis dan bertanggung jawab. TPB kini telah menjadi acuan bagi banyak gerakan perubahan termasuk aktivitas bisnis dan investasi salah satunya melalui konsep investasi yang berkelanjutan (*Sustainable Investment*). Investasi berkelanjutan adalah istilah bagi aktivitas penanaman modal yang

memperhatikan aspek *Environment, Social, and Governance (ESG)*. Pelakunya sering kali disebut *Impact Investor* dengan orientasi pada investasi yang memberikan dampak.

Dalam bincang-bincang (*talkshow*) rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia dengan topik “*Collaborative Development of Indonesia Sustainable Investment Guidance*” yang diselenggarakan pada Kamis (17/3), salah satu panelis, Benedikta Atika dari Angel Investor Network Indonesia (ANGIN) menyampaikan sektor yang paling menarik perhatian *impact investors* di Indonesia terutama adalah sektor pangan, pertanian (agribisnis), serta inklusi keuangan.

Banyak pihak kemudian mendorong supaya posisi Presidensi G20 Indonesia digunakan sebagai sarana menyuarakan investasi berkelanjutan di sektor pertanian, salah satunya oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dilansir dari Antara. Model investasi harus ditawarkan dengan konsep berkeadilan terutama bagi petani kecil (*smallholder farmers*). Sangat disayangkan jika investasi justru melahirkan kelompok marjinal di masyarakat.

Petani Sebagai Stakeholder

Investasi berkelanjutan di sektor pertanian tidak hanya untuk sebatas meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan hasil panen. Tidak hanya juga sebatas praktik pertanian yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Keberlanjutan di sektor ini juga dibutuhkan untuk pembangunan manusia (*human resource development*) serta kedaulatan pangan, tidak hanya ketahanan pangan.

Sering kali terlupakan bahwa petani juga merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor ini. Penelitian yang dilakukan *European Commission on Science for Environment Policy* pada tahun 2016 menunjukkan petani sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh terbesar dikarenakan kapasitasnya dalam

membuat keputusan final di lahan pertanian. Namun, pengaruhnya dalam rantai pasok ternyata terbatas terutama terkait keputusan harga. Jumlah petani di Indonesia didominasi lebih dari 50% petani kecil (*smallholders*) menurut data BPS, sehingga begitu disayangkan kurangnya keterwakilan suara *smallholders*.

Investasi berkelanjutan pertanian akan menjadi siklus, di mana keberlanjutan pertanian yang ditunjukkan oleh petani akan mempengaruhi ketertarikan *impact investors*, begitupula investasi *impact investors* akan berkontribusi juga bagi petani. Penting bagi investasi berkelanjutan di bidang pertanian untuk tak lupa memperhatikan dampak bagi petani dari segala aspek sekaligus.

Sebagai contoh sederhana, upaya meningkatkan produktivitas tanpa kontrol harga menyebabkan jatuhnya harga komoditas yang merugikan petani, maka pertanian yang sukses bukan hanya sekedar jumlah panen. Pendanaan atau subsidi input pertanian yang tidak mempertimbangkan kondisi unik pertanian di wilayah tertentu menyebabkan subsidi yang tidak tepat sasaran, maka keberlanjutannya bukan sekedar input yang melimpah, tapi input yang sesuai. Bahkan bagi nilai produktivitas, peningkatan investasi 1452% untuk pupuk bersubsidi berdasarkan data himpunan KRKP sejak awal pandemi masih belum menunjukkan pengaruh pada produktivitas pertanian yang cenderung stagnan. Hal lain lagi seperti tren digitalisasi dan penggunaan teknologi tanpa pendekatan sosio-kultural dapat memarjinalkan petani-petani dengan keterbatasan. Sangat berbahaya menghadirkan perubahan yang terkesan dilakukan “demi kebaikan petani” tanpa menyadari bahwa metode perubahan yang salah kemudian memojokkan petani.

Peningkatan pendapatan tidak serta merta kemudian menurunkan kesenjangan sosial. Rendahnya Nilai Tukar Petani sebagai indeks kesejahteraan masih menjadi tantangan.

Menyiapkan Petani untuk Kehadiran Investasi Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan diharapkan untuk menjadi sumber pemodal untuk mendorong inovasi-inovasi yang berkontribusi bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, ada tanggung jawab pula untuk membuktikan dan meyakinkan *impact investors* bahwa pendanaan akan benar-benar memberikan dampak. Di sinilah pentingnya kerja sama antar *stakeholder* untuk mempersiapkan sistem pertanian terutama petani untuk membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan sistem keberlanjutan.

Menggunakan prinsip sirkular ekonomi *inclusive closed-loop* seperti yang dicanangkan oleh PISAgro, dibutuhkan lebih banyak pelaku yang menjalankan *pilot project* sistem pertanian yang berkelanjutan dan layak sebagai sasaran investasi. Proyek sistem pertanian dengan *inclusive closed-loop* ini tidak hanya menjamin kelestarian alam, kelancaran bisnis, dan efisiensi sumber daya, tetapi juga merangkul komunitas petani dan memberikan dampak langsung bagi kualitas hidup mereka. Petani juga dibekali pelatihan yang memadai untuk siap menyongsong sistem modern dan berkelanjutan, serta memiliki akses pada keuangan yang inklusif. Dengan demikian, *impact investors* memiliki gambaran nyata baik keuntungan secara ekonomi maupun dampak ESG yang diharapkan.

Tanpa mengesampingkan permintaan (*demand*) atas kelancaran rantai pasok pangan dan produk pertanian esensial lainnya, investasi berkelanjutan tidak boleh melupakan petani sebagai produsen sekaligus konsumen. Kesejahteraan petani sebagai *stakeholder* tidak hanya sebatas melimpahnya hasil panen. Investasi berkelanjutan pertanian adalah konsep kompleks jika bersungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan acuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Pembangunan Berkelanjutan itu bukan hanya sekedar slogan, itu seharusnya menjadi hal umum [untuk acuan] pembangunan nasional. Banyak orang setuju apa itu pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang bertanggung jawab dan tidak mengorbankan generasi masa depan. Tetapi tidak semua orang paham cara melakukannya. Mereka yang mengaku paham pun juga memiliki pemahaman yang berbeda [terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan investasi berkelanjutan]. Maka dari itu, panduan [investasi berkelanjutan] adalah alat yang sangat penting,” kata Indra Darmawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BPKM.

Feature

Engaging Farmers in Agricultural Sustainable Investment

Radyani Prasasya

Farmers are important stakeholders in investment in the agricultural sector

Considering the large contribution of the agricultural sector to the economy, which is not only limited to its contribution to GDP, but also to Indonesia's food security, the sector deserves to be in the center of attention. To continue encouraging the development and improving the competitiveness of Indonesian agriculture, investment is considered strategic. As a sector that continues to grow despite the pandemic, the Central Statistics Agency has again recorded positive growth in the value of exports of agricultural products in the January-February 2022 period. It is preferred to have this kind of growth to continue, especially supported by investment.

FDI investment in the agricultural sector was recorded at only 3-7% of the total investment according to data from the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) in 2015-2019 period. Most of it contributes only to the palm oil sector, which shows that there are many commodities and unopened doors in the agricultural sector that have not been exposed to investment.

Sustainable Investment

The Sustainable Development Goals (SDG) was announced to be one of the driving factor for changing behavior to become more ethical and responsible. TPB has now become a reference for many changes, including business and investment activities, one of which is through the concept of sustainable investment. Sustainable investment is a term for investment activities that highly considering

the aspects of Environment, Social, and Governance (ESG). The actors are often called Impact Investors with orientations on investments that gives notable impacts.

In the talkshow series of the G20 Indonesia Presidency events with the topic "Collaborative Development of Indonesia Sustainable Investment Guidance" which was held on Thursday (17/3), one of the panelists, Benedikta Atika from Angel Investor Network Indonesia (ANGIN) conveyed the sectors that have most attracted Impact Investors in Indonesia are food, agriculture (agribusiness) sectors, and financial inclusion.

Several parties then pushed for encouraging using position of the Indonesian G20 Presidency to be used as a means of voicing sustainable investment in the agricultural sector, one of which was the People's Coalition for Food Sovereignty (KRKP), as reported by Antara. The investment model must be offered with a fair concept, especially for smallholder farmers. It is very unfortunate if investment actually drives

Farmers as Stakeholders

Sustainable investment in the agricultural sector is not only limited to increasing farm productivity and crop yields. It is not only limited to environmentally friendly and responsible agricultural practices. Sustainability in this sector is also needed for human resource development and food sovereignty, not only food security.



It is often forgotten that farmers are also stakeholders in this sector. Research conducted by the European Commission on Science for Environment Policy in 2016 showed farmers as stakeholders are having the greatest influence due to their capacity to make final decisions on farm. However, their voices on post-farm decision such as pricing is surprisingly limited. The number of farmers in Indonesia is dominated by more than 50% of smallholders (smallholders) according to BPS data. It is unfortunate that the smallholders' voices are not represented properly.

The agricultural sustainable investment will be a cycle, where agricultural sustainability conducted by farmers will affect the interest of Impact Investors, as well as their decision on investments, which will also contribute back to farmers. It is important for sustainable investments in agriculture not to forget to pay attention to the impact of investment or changes on farmers from all aspects at once.

As examples, efforts to increase productivity without price controls cause commodity prices to drop which are detrimental to farmers, thus successful agriculture is not just about the number of yields. Funding or subsidies for agricultural inputs that do not take into account the unique conditions of agriculture in particular areas cause subsidies that are not well-targeted, therefore sustainability is not just about abundance of inputs, but appropriate inputs. Even for the value of

productivity, an increase in investment of 1452% for subsidized fertilizers based on data from the KRKP collection since the beginning of the pandemic has not shown any effect on agricultural productivity which still tends to stagnate. Another issue, such as the trend of digitization and the use of technology without a socio-cultural approach, can marginalize farmers with knowledge and understanding limitations. It is very dangerous to bring about changes that seem to be made "for the good of the farmers" without realizing that the wrong method of change will then push the farmers away.

An increase in income does not necessarily reduce social inequality. The low Farmer Exchange Rate as a welfare index is still a challenge.

Preparing Farmers to Welcome Sustainable Investments

Sustainable investment is expected to be a source of capital to encourage innovations that contribute to food sovereignty and farmers' welfare. On the other hand, there is also a responsibility to prove and convince impact investors that the funding will actually make an impact. This is where the importance of collaboration between stakeholders to prepare for a good agricultural system, especially farmers to prove their ability to adapt to a sustainable system.

Using the circular economy inclusive closed

loop principle as proclaimed by PISAgro, more actors are needed to carry out pilot projects of sustainable and feasible agricultural systems as investment targets. This agricultural system idea basing on inclusive closed-loop will not only ensure environment sustainability, business continuity, and resource efficiency but also embrace farming communities and provide direct impact on their quality of life. Farmers are also provided with adequate training to be ready to face modern and sustainable system and given better access to financial inclusion. Thus, Impact Investors have a real picture of both the economic benefits and the expected ESG impacts.

Without compromising the demand from the food supply chain and other essential agricultural products, sustainable investments must not forget farmers as producers as well as consumers. The welfare of farmers as stakeholders is not only limited to the quantity of yields. Agricultural sustainable investment is truly a complex concept if seriously implemented in accordance with the reference to the Sustainable Development Goals.

“Sustainable development is not only a slogan, it has to be a mainstream of the national development. Many people agree what sustainable development means, that you do your development without compromising for future generations. But not everybody knows how to do that. Those who claims [that they] know, also have many different definitions for that [sustainable development]. Therefore, a guidance is a very important tool,” said by Indra Darmawan, Expert Staff for Macroeconomics at the Ministry of Investment/BPKM.

Sorotan

1. Sesi Pecahan (Breakout Session) untuk Indonesia pada “Bold Actions for Food: Regional and Country Flagships – Driving Collective Action for Country and Regional Impact – East” dari World Economic Forum

Pada tanggal 15 Maret 2022, Direktur Eksekutif kami, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk memfasilitasi sebuah sesi pecahan (breakout session) untuk Indonesia dalam acara “Bold Actions for Food: Regional and Country Flagships - Driving Collective Action for Country and Regional Impact – East” yang diselenggarakan oleh World Economic Forum.

Pada kesempatan kali ini, perwakilan PISAgro memfasilitasi sambutan-sambutan khusus mengenai peluang dan tindakan strategis untuk mencapai presidensi G20 Indonesia pada tahun ini dan presidensi ASEAN pada tahun 2023, serta meningkatkan peranan inovasi digital dan data untuk memajukan sektor pertanian dan mendukung para petani.

2. Webinar Strategi Pelaporan NDPE dalam Laporan Keberlanjutan untuk Sektor Pertanian

Pada tanggal 24 Maret 2022, PISAgro bersama Global Reporting Initiative (GRI) mengadakan webinar pembuka dengan topik “Strategi Pelaporan NDPE dalam Laporan Keberlanjutan untuk Sektor Pertanian”.

Webinar ini membahas tentang kebijakan pemerintah terkait NDPE dan implementasinya dalam kebijakan dan operasional perusahaan, strategi pelaporan dan pencapaian NDPE dalam laporan keberlanjutan yang sesuai dengan POJK dan Standar GRI Terbaru (Standar GRI G3), serta penjelasan mengenai ‘coaching session tertutup’ untuk mempelajari NDPE dan cara pelaporannya dalam laporan keberlanjutan.



3. Webinar Agribisnis dan MBKM, Belajar dari Pengalaman Saat Ini

Pada tanggal 26 Maret 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menyampaikan paparan seputar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sektor agribisnis dalam acara “Webinar Agribisnis dan MBKM, Belajar dari Pengalaman Saat Ini” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Agribisnis Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, dihasilkan capaian berupa catatan-catatan yang diperlukan untuk penyempurnaan program MBKM, serta peningkatan kontribusi Pendidikan Tinggi Agribisnis pada pembangunan agribisnis Indonesia.

4. Diskusi Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025

Pada tanggal 30 Maret 2022, PISAgro mengadakan webinar dengan topik “Diskusi Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025”. Webinar ini membahas tentang sosialisasi arah kebijakan dan rencana kegiatan pemerintah mengenai pengembangan sapi Jersey dalam kerangka menuju swasembada susu dan ketahanan pangan nasional yang sesuai target indicator pada Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025.

Pada kesempatan kali ini, dihasilkan capaian berupa konsep, pandangan, pengalaman praktis dan rekomendasi dari para pelaku di sektor industri persusuan sebagai pengetahuan bersama untuk pengembangan ekosistem sapi Jersey di Indonesia, serta agenda untuk menyusun Peta Jalan Pengembangan Sapi Jersey untuk Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025.

5. Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022

Pada tanggal 1 April 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Solo di Solo, Jawa Tengah.

Pada kesempatan kali ini, diselenggarakan tiga forum dialog yang menekankan pada implementasi dan penetrasi teknologi digital pada keuangan daerah, layanan pengembangan UMKM, serta digitalisasi desa.

Highlights

1. Breakout Session for Indonesia on “Bold Actions for Food: Regional and Country Flagships - Driving Collective Action for Country and Regional Impact – East” by World Economic Forum

On the 15th of March 2022, our Executive Director, Insan Syafaat, represented PISAgro Secretariat to facilitate a breakout session for Indonesia in “Bold Actions for Food: Regional and Country Flagships - Driving Collective Action for Country and Regional Impact – East” that held by World Economic Forum.

In this opportunity, PISAgro representative had facilitated special remarks regarding opportunities and strategic actions to achieving Indonesia's G20 presidency priorities this year and ASEAN presidency in 2023, and also improving data and digital innovation to improve agricultural sector and supporting smallholder farmers.

2. NDPE Reporting Strategy in Sustainability Reports for the Agriculture Sector

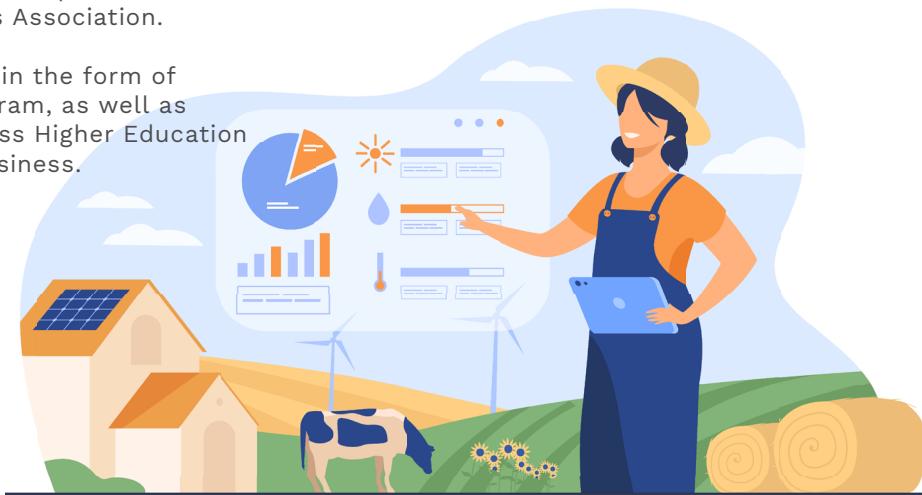
On the 24th of March 2022, PISAgro, alongside with Global Reporting Initiative (GRI) held an opening webinar with the topic “NDPE Reporting Strategy in Sustainability Reports for the Agricultural Sector”.

This webinar discusses government policies related to NDPE and their implementation in company policies and operations, reporting strategies and NDPE achievements in sustainability reports in accordance with POJK and the Latest GRI Standards (GRI G3 Standards), as well as an explanation of 'closed coaching sessions' to learn further about NDPE and how to report it in a sustainability report.

3. Agribusiness and MBKM Webinar, Learn from Current Experience

On the 26th of March 2022, our Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to deliver a reflection about the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program in the agribusiness sector in the “Agribusiness and MBKM Webinar, Learning from Current Experience”, organized by the Indonesian Agribusiness Association.

On this occasion, results were produced in the form of notes needed to improve the MBKM program, as well as increasing the contribution of Agribusiness Higher Education to the development of Indonesian agribusiness.



4. Discussion on Increasing Domestic Milk Production through the Development of Jersey Cows to Support the Achievement of the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint Indicators

On the 30th of March 2022, PISAgro held a webinar with the topic “Discussion on Increasing Domestic Milk Production through the Development of Jersey Cattle to Support the Achievement of the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint Indicators”. This webinar discusses the socialization of government policy directions and activity plans regarding the development of Jersey cattle within the framework of achieving milk self-sufficiency and national food security in accordance with the target indicators in the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint.

On this occasion, results were produced in the form of concepts, views, practical experience and recommendations from actors in the dairy industry as shared knowledge for the development of the Jersey cattle ecosystem in Indonesia, as well as an agenda for compiling a Jersey Cattle Development Roadmap for the 2013 Indonesian Dairy Blueprint- 2025.

5. Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022

On the 1st of April 2022, our Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to attend the Digitization of the Nusantara Expo & Summit 2022 organized by the Solo Chamber of Commerce and Industry (KADIN) in Solo, Central Java.

On this occasion, three dialogue forums were held that emphasized the implementation and penetration of digital technology in regional finance, MSME development services, and village digitization.

Profil

Arief P. Rachmat:

Peranan Business 20/B20 dalam Presidensi G20 serta Perspektif dan Strategi Swasta dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Hendri Surya Widcaksana

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arif P. Rachmat memiliki perspektif tersendiri mengenai presidensi G20 dan kelompok Business 20/B20 serta upaya memajukan ekonomi di sektor pangan dan agribisnis.

Pada kesempatan kali ini, PISAgro berbicara dengan beliau mengenai peranan presidensi G20 dan kelompok B20 dalam upaya memajukan pertanian Indonesia serta perspektif dan strategi swasta dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai presidensi G20 yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia, dan juga engagement group-nya seperti B20, C20, S20, U20, dan Y20?

Tentu saja, presidensi G20 yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi negara kita. Kita tahu, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 mewakili lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, Hal ini membuat G20 adalah forum yang sangat strategis untuk



mencapai tujuan bersama anggota negara G20 yang terdiri dari negara berkembang dan negara maju. G20 juga mempunyai engagement group, seperti salah satunya adalah Business of Twenty (B20). B20 adalah forum dialog resmi dari G20 dengan anggota dari komunitas dan pemimpin bisnis global. B20 mempunyai struktur berupa Task Force & Action Council di bawahnya. Kebetulan, saya mendapatkan mandat dari ketua B20 Indonesia, ibu Shinta Kamdani, sebagai Chair of Trade & Investment Task Force untuk B20 Indonesia kali ini.

Sesuai tema G20 kali ini, yakni Recover Together, Recover Stronger, apa sih makna di balik semboyan tersebut, terutama di sektor pertanian?

Recover Together, Recover Stronger, ini maknanya adalah Indonesia mendorong semua negara untuk bekerja sama, mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan, di tengah perekonomian dunia yang masih terkena dampak dari pandemik COVID-19. Pandemik berdampak pada semua sektor, termasuk pertanian. Maka pada momentum ini, kami dari bidang Pertanian KADIN Indonesia juga berharap, melalui G20, dan B20 khususnya, bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kembali pertumbuhannya. 3 Hal yang menjadi prioritas dalam tema besar G20 maupun B20 yaitu *Global Health, Digitalization Transformation & Green Energy Transition*, akan sangat membantu dan berdampak positif pada salah satu tujuan penting di bidang pertanian, yaitu Ketahanan Pangan.

Bagaimana kontribusi B20 terhadap kemajuan ekonomi sektor pangan dan agribisnis di Indonesia, terutama di masa-masa menantang seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19?

Nah, ini pertanyaan yang bagus, karena jawabannya kebetulan selaras dengan prioritas B20 Indonesia saat ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa prioritas kita adalah penanganan kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan, maka semuanya akan membantu dalam pemulihan dan perbaikan tata kelola pertanian dari hulu sampai ke hilir. Bisnis berbasis sumber daya alam, seperti bidang Pertanian, tidak bisa lepas dari tantangan perubahan iklim dan resiko lain, seperti pandemik COVID-19 yang kita alami. Inovasi seperti Digitalisasi Pertanian dan langkah nyata dalam Transisi Energi adalah usaha dalam Mitigasi dan Adaptasi untuk tantangan tersebut. Sehingga prioritas-prioritas yang diusulkan oleh anggota-anggota B20, khususnya dalam Trade & Investment Task Force yang saya pimpin, telah mendorong hal tersebut sebagai draft policy yang akan kami usulkan. Kebijakan ini sangat penting, tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi berlaku di negara G20 yang dapat memberikan dampak global yang positif pada perbaikan untuk kemajuan sektor pangan dan agribisnis.

Saat ini, krisis iklim menjadi tantangan tersendiri dalam strategi menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Menurut pandangan Bapak, bagaimana pandangan swasta dalam menangani hal ini? Apa saja sih resiko dan dampak dari perubahan iklim untuk sektor pertanian yang perlu untuk diketahui banyak kalangan?

Perubahan iklim adalah nyata, kita tidak bisa mengabaikan ancaman itu untuk tujuan bisnis jangka pendek. Kemarau panjang, musim kering yang ekstrim, banjir dan anomali iklim lainnya yang dapat menghambat segala aktivitas manusia. Hanya 2 hal yang bisa dilakukan manusia, dalam sektor apapun, yaitu usaha untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Menurut pandangan saya, private sector umumnya telah

sadar dan telah bersiap menghadapinya. Kami sangat mendukung upaya pemerintah dalam hal ini, seperti komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC), menerbitkan peraturan tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang nantinya akan diatur mekanisme perdagangan karbon untuk memenuhi tujuan tersebut. Kami percaya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah hal yang tidak bisa ditawar untuk menjamin usaha kita juga berkelanjutan.

Dalam mendukung presidensi G20 di Indonesia, terutama di B20, bagaimana strategi swasta dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, dan bagaimana inovasi serta teknologi dapat membantu setiap pihak dalam mendukung upaya tersebut?

Pertanyaan ini sangat terkait dengan program prioritas Bidang Pertanian KADIN saat ini, yaitu terkait dengan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam 2 pertemuan terakhir B20 untuk Trade & Investment Task Force, yaitu pada Leadership Meeting dan 2nd Task Force Meeting untuk pembahasan draft policy paper, kami memperkenalkan Inclusive Closed Loop model dalam pendekatan investasi maupun rantai pasok secara inklusif. Para pemimpin dan anggota task force B20 menerima dengan baik model ini, karena memang secara inklusif kita tidak berbicara hanya petani, tetapi juga UMKM dan Koperasi sehingga lebih umum. Ailih teknologi seperti transformasi digital terbukti membantu memperbaiki sistem menjadi lebih efisien, lebih sederhana, lebih cepat dan murah, memberikan nilai tambah kepada petani atau UMKM dan kepada pelanggan mereka.

Bidang Pertanian KADIN mempunyai 7 komite tetap, yang semuanya mempunyai program dan inisiatif untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Profile

Arief P. Rachmat

Sharing Perspectives and Strategies for Business 20 (B20) Role in G20 Presidency and Private Sector's Support Towards Food Security and Farmers' Welfare

Hendri Surya Widcaksana

As the Vice Chairman of Agriculture Department in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Arif P. Rachmat has his own perspectives when it comes to the G20 presidency and Business 20 (B20) group, as well as the nation's efforts to improve the food and agribusiness sectors. Check out our interview in the following article.

During this interview, PISAgro received an opportunity to hear his perspective regarding B20 and G20 presidency respective roles upon improving Indonesia's agriculture, as well as the private sector strategies in maintaining food security and supporting farmers' welfare.

Read our interview in this article below.

Can you share to us about your perspective regarding this year's G20 presidency hosted by Indonesia, as well as its engagement groups such as B20, C20, S20, U20, and Y20?

I definitely see this year's G20 presidency as a form of honor and trust towards our country. As we all know, G20 is a multilateral cooperation forum which consists of 19 central countries and European Union countries. G20 has represented over than 60 percent of Earth's population, 75 percent of global trade, and 80 percent of the world's gross domestic product (GDP). These aspects are factoring into G20's reputation as a strategic forum to achieve collective goals shared by developed and developing countries alike.

Furthermore, G20 also has its own

engagement groups, such as the Business of Twenty (B20). B20 is an official dialogue forum initiated by G20 which members comprise of individuals and leaders from global business networks. Reporting to the B20 is the Task Force & Action Council. As for this year's G20, I received a mandate from the Trade & Investment Task Force chairman herself, Mrs. Shinta Kamdani.

Would you mind explaining what is the meaning behind "Recover Together, Recover Stronger" that was used for this year's G20 theme, especially in regards to the agriculture sector?

"Recover Together, Recover Stronger" here is referring to Indonesia's effort to push every nation to work together to achieve a stronger and a more sustainable world amid the COVID-19 pandemic, which also severely affected the global economy. This pandemic has landed a heavy blow at every sector, including agriculture. Through this momentum, we here in KADIN's Agriculture Department wishes that G20 and B20 could help speed up the economic recovery process as well as to accelerate its growth.

There are three things that became our priorities in G20 and B20's grand theme, such as global health, digitalization transformation, and green energy transition. These three aspects will be very helpful in creating positive impact in maintaining food security, which is one of the most important objectives in the agriculture sector.

How does B20 contributes to the improvement of agribusiness and food sectors in Indonesia, especially during

challenging times such as climate change and the COVID-19 pandemic?

This is a great question, since the answer aligns with Indonesia's current priorities for B20. As I have mentioned before, we have several priorities such as to create an inclusive global healthcare, digital-based transformation, and a transition to shift towards sustainable energy. These actions would help in improving and recovering agriculture governance system from upstream to downstream. We cannot separate environment-based business from certain challenges, such as climate change and the ongoing COVID-19 pandemic.

Furthermore, other innovations such as agriculture digitalization and energy transition are part of mitigation and adaption efforts to answer the aforementioned challenges. Other recommended priorities from the rest of B20 members, specifically those concerning the Trade and Investment Task Force which I lead, have pushed these innovations to be included in the policy draft that we propose. This policy is important as it will not be only implemented in Indonesia, but also in other G20 countries and expected to be able to give positive global impacts to improve food and agribusiness sectors.

The ongoing climate crisis has posed a challenge in maintaining food security as well as supporting farmers' welfare. How do you see private sector's role in handling this issue? What are the risks and impacts posited by the climate challenge against the agriculture sector that we should be aware of?

Climate change is a real thing. We cannot ignore the thread it poses in lieu of short-term business purposes. Long draught, extreme dry season, floods, and other climate anomalies are a hindrance to humans' activities. There are only two things that us mankind could do to overcome that, such as mitigation effort and adapting to climate changes. In my opinion,

the private sector is generally aware about these things and have made some preparations to overcome that. We highly support the government's effort to solve these issues, such as Indonesia's commitment towards the Paris Agreement and Nationally Determined Contribution (NDC), as well as issuing the Carbon Economic Value policy, which stipulates the mechanism for carbon trade. We believe that a good governance practice, that is also environment friendly and sustainable, is an unnegotiable requirement to ensure the sustainability of our business.

What are the private sector's strategies to support food security and farmers' welfare during the G20 presidency momentum in Indonesia, and what are the innovations and technologies that can be used to assist every related stakeholder upon carrying out that effort?

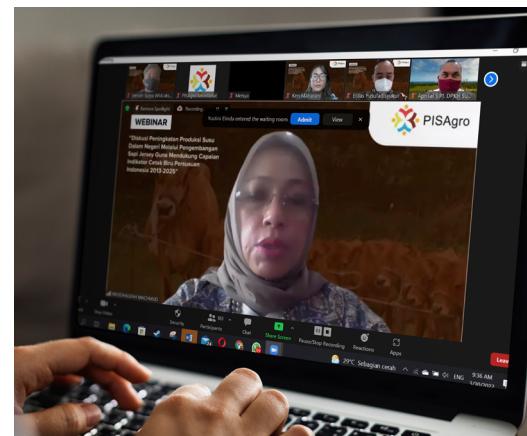
This question is closely related to KADIN's Agriculture Department current program which also concerns food security and farmers' welfare. During the last two B20 meetings for Trade & Investment Task Force, which are pertaining the leadership meeting and the draft policy paper discussion, we introduced the inclusive closed loop model approach for investment and inclusive chain supply. Leaders and members of the B20 task force are responding to this model positively since it allows us to also improving small enterprises and cooperatives' welfare alongside farmers.

Technology transition, such as digital transformation, has been proven helpful to improve the system to become more efficient, simple, fast, and cheap to add more value to products from farmers and small enterprises for their customers.

KADIN's Agriculture Department has 7 permanent committees, in which each of them developed their own programs and initiatives to support food security and improving farmers' welfare.

Webinar

Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025



Ferial Lubis

Sengenalan sapi Jersey sebagai sapi perah unggul, memberi optimisme baru bagi pembangunan industri persusuan nasional, terutama peningkatan populasi sapi perah, yang selama ini hanya bergantung pada satu jenis rumpun sapi yaitu Friesian Holstein (FH). Kebijakan pelepasan rumpun sapi Jersey adalah terobosan kebijakan yang tepat karena sapi Jersey memiliki potensi yang besar untuk dibudidayakan di Indonesia demi mendongkrak populasi menuju swasembada susu di masa mendatang.

“Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 766/KPTS/PK.020/M/12/2021 tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Sapi Jersey, yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 2021, merupakan tonggak bersejarah dalam Persapiperahan dan Persusuan Nasional serta menjadi momentum kebangkitan persapiperahan Indonesia guna mendukung Tahap Persusuan Tangguh 2021-2025 yang sejalan dengan Cetak Biru Persusuan Nasional”, ungkap Dr. Ir. Nasrullah dalam webinar “Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025” yang diadakan oleh PISAgo pada tanggal 30 Maret 2022.

Kebijakan tersebut dipertimbangkan karena beberapa hal, yakni keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan perbibitan ternak,

kemampuan adaptasi terhadap iklim tropis Indonesia, kebutuhan pakan yang lebih sedikit karena performa tubuh yang relatif kecil dibandingkan sapi Friesian Holstein, serta produksi per ekor yang cukup tinggi, yaitu 25 liter per hari. Meskipun demikian, Nasrullah menambahkan, diperlukan pemeliharaan yang baik agar produktivitas juga dapat ditingkatkan.

Dalam webinar ini, juga dibahas mengenai pemaparan mengenai Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) dan Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025, outlook rumpun sapi Jersey dalam perdagangan global serta prospek dan tantangannya, serta tinjauan mengenai performa sapi perah Jersey di peternakan beriklim tropis.

Di webinar ini, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud menjelaskan bahwa strategi, kebijakan, program, dan target indikator perkembangan persusuan sudah ada di dalam Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2015, sehingga tidak perlu adanya perubahan dalam cetak biru tersebut. Tetapi, Musdhalifah menambahkan bahwa peta jalan pengembangan sapi Jersey perlu ditambahkan, mengingat peta jalan sebelumnya hanya sapi Friesian Holstein saja.

Oleh karena itu, penyusunan peta jalan pengembangan sapi Jersey perlu segera disusun guna mendukung capaian tersebut. Peta jalan

ini terdiri atas rencana jangka pendek hingga jangka panjang yang meliputi aspek produksi, reproduksi, ekonomi, serta logistik. Untuk penyusunan sendiri, peta jalan tersebut disusun oleh Tim Khusus yang dikoordinasikan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta didukung oleh kementerian dan lembaga lainnya dan juga melibatkan stakeholders lainnya, seperti Prisma dan PISAgro.

Untuk pemeliharaan Jersey sendiri, saat ini baru ada PT Greenfields Indonesia yang melakukan pemeliharaan secara intensif dengan jumlah yang relatif besar. Dari hasil peninjauan yang telah dilakukan, drh. Heru Prabowo menyatakan bahwa data kinerja produksi dan reproduksi sapi Jersey yang dipelihara dapat digunakan sebagai garis acuan (baseline) untuk studi lebih lanjut mengenai prospek dan tantangan pengembangan sapi Jersey di peternakan rakyat.

Dari webinar ini, dihasilkan beberapa keluaran berupa pemahaman mengenai arah kebijakan dan rencana pemerintah mengenai pengembangan sapi Jersey, pemahaman mengenai konsep, pandangan, pengalaman serta rekomendasi dari pelaku industri persusuan, serta kesepakatan mengenai agenda bersama untuk penyusunan Peta Jalan Pengembangan Rumpun Sapi Jersey di Indonesia. Pengembangan sapi Jersey diharapkan akan dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, serta memperhatikan kesejahteraan peternak.

Materi selengkapnya terkait webinar ini dapat anda akses melalui bit.ly/webinarjersey

Webinar

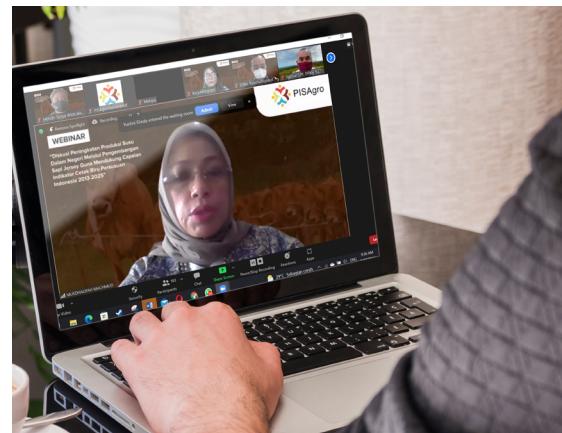
Increasing Domestic Milk Production through the Development of Jersey Cattle to Support the Achievement of the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint Indicators

Ferial Lubis

The introduction of Jersey cattle as superior dairy cows gives new optimism for the development of the national dairy industry, especially the increase in the population of dairy cattle, which so far only depend on one type of cattle, namely Friesian Holstein (FH). The policy of shedding the Jersey cattle is the right policy breakthrough because Jersey cattle have great potential to be cultivated in Indonesia to boost the population towards self-sufficiency in dairy in the future.

"The Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 766/KPTS/PK.020/M/12/2021 regarding the Release of the Introduction of the Jersey Cattle Clump, which came into effect on 16th of December 2021, is a historic milestone in Dairy and National Dairy and has become a momentum for the revival of Indonesian dairy cows to support the Tough Dairy Phase 2021-2025 which is in line with the National Dairy Blueprint", said Dr. Ir. Nasrullah in the webinar "Increasing Domestic Milk Production through the Development of Jersey Cattle to Support the Achievement of the 2013-2025 Indonesian Dairy Blueprint Indicators" held by PISAgro on the 30th of March 2022.

The policy was considered for several reasons, including the diversity of animal genetic resources and livestock breeding, the ability to adapt to the tropical climate of Indonesia, the need for less feed due to the relatively small



body performance of Holstein Friesian cattle, and the high production per head, which is 25 litres per day. However, Nasrullah added, proper maintenance is needed so that productivity can also be increased.

In this webinar, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud explained that the strategies, policies, programs, and targets for indicators of dairy development are already included in the 2013-2015 Indonesian Milk Blueprint, so there is no need for changes to the blueprint. However, Musdhalifah added that the Jersey cattle development roadmap needs to be added, considering that the previous roadmap was only Holstein Friesian cattle.

Therefore, the preparation of a roadmap for the development of Jersey cattle needs to be immediately prepared to support this achievement. This roadmap consists of short-term to long-term plans covering aspects of production, reproduction, economy, and logistics. For the preparation itself, the roadmap was prepared by a Special Team coordinated by the Directorate of Breeding and Production, the Directorate General of Livestock and Animal Health, and supported by other ministries and institutions and also involving other stakeholders, such as Prisma and PISAgro.

For the maintenance of the Jersey itself, currently only PT Greenfields Indonesia is carrying out intensive maintenance with a relatively large number. From the results of

the review that has been carried out, drh. Heru Prabowo stated that the production and reproductive performance data of Jersey cattle that are kept can be used as a baseline for further studies on the prospects and challenges of developing Jersey cattle on smallholder farms.

From this webinar, several outputs were produced in the form of an understanding of the direction of government policies and plans regarding the development of Jersey cattle, an understanding of the concepts, views, experiences and recommendations of the dairy industry, as well as an agreement on a common agenda for the preparation of the Jersey Cattle Clump Development Roadmap in Indonesia. Hopefully, the development of Jersey cattle will be carried out in an inclusive and sustainable manner with good cooperation from various stakeholders, and also proper attention to the welfare of farmers.

You can access the complete material regarding this webinar via bit.ly/webinarjersey

WG Story

Save the Children Indonesia Mengadakan Side Event C20 Kick-Off Meeting: Seruan Kepada Para Pemimpin Dunia Tentang Masa Depan Anak-anak yang Terancam

Bali, 8 Maret 2022 - Civil 20 (C20) yang merupakan salah satu engagement groups dalam G20 melaksanakan kick off meeting pada 7 Maret 2022 di Bali. Sebagai salah satu anggota dalam C20, Save the Children menginisiasi side event / pertemuan tambahan untuk menyerukan urgensi permasalahan dan risiko yang dihadapi anak di seluruh dunia. C20 adalah salah satu ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi menyuarakan prioritas isu yang perlu ditangani serius.

“Saat ini anak – anak dan orang muda diseluruh dunia dihadapkan pada ancaman global termasuk COVID-19, Krisis Iklim, Perang dan Konflik, serta krisis penghidupan. Ancaman ini menghadirkan risiko besar bagi masa depan dan Bumi yang berkelanjutan agar anak – anak dapat hidup aman, nyaman dan terpenuhi hak – haknya. Untuk itu, penting untuk menyerukan hal ini agar menjadi prioritas dalam pembahasan G20” Jelas Selina Patta Sumbung – CEO Save the Children Indonesia.

Tahun 2022, sebagai penerima Presidensi Group 20 (G20), Pemerintah Indonesia berupaya membangun kesepahaman di antara pemimpin G20 terkait berbagai persoalan yang di hadapi masyarakat global agar pulih bersama dan pulih lebih kuat yang menjadi tema utama G20 Recover Together, Recover Stronger.

C20 merupakan wadah organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menjembatani gerakan komunitas sipil global ke pengambil kebijakan dan keputusan G20. C20 berupaya menyuarakan isu-isu masyarakat sipil, salah

satunya mengenai Pendidikan, Digitalisasi, dan Ruang Publik (Education, Digitalization, and Civic Space).

Side Event C20 yang diselenggarakan oleh Save the Children mengusung permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pihak dan Para Pemimpin G20, diantaranya 1) masalah kekerasan berbasis gender salah satunya ditandai dengan pernikahan anak; 2) masalah perlindungan anak diranah daring dimana karena pandemi anak menjadi terekspos dengan dunia digital dan online; 3) masalah akses ke vaksin, tidak hanya vaksin COVID-19 tetapi juga terganggunya pelaksanaan vaksinasi reguler; 4) krisis iklim dan ketahanan anak; serta 5) masalah kesetaraan gender pada anak dan perlunya perlindungan sosial yang adaptif.

Data dan fakta yang memperkuat permasalahan tersebut telah diutarakan oleh berbagai pihak seperti: Unicef (2020) menyatakan bahwa setiap tahun, 12 juta anak perempuan menikah ketika berusia belum 18 tahun. Lebih lanjut disampaikan bahwa 21% dari perempuan muda menikah sebelum mereka berulang tahun ke-18. DQ (Digital Quotient) Institute (2020) menemukan bahwa secara global anak-anak berusia 8 – 12 tahun mengalami masalah yang dinamakan cyber pandemic. Terdapat 60% anak-anak 8 – 12 tahun terpapar dengan risiko dunia digital diantaranya bertemu dengan orang-orang asing atau mengalami pelecehan seksual, kekerasan atau muatan pornografi, ancaman, gangguan media sosial, cyber-bullying, dan risiko nama baik.

Pada sektor kesehatan, data juga menunjukkan gambaran buram. Menurut WHO dan UNICEF cakupan vaksinasi reguler anak mengalami penurunan dari 86% di 2019, menjadi 83% di 2020. Diperkirakan 23 juta anak umur di bawah 1 (satu) tahun tidak mendapatkan vaksin standar. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2009. Pada tahun 2020, jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan vaksinasi meningkat menjadi 3,4 juta.

Pada konteks krisis iklim, laporan terbaru Save the Children tahun 2021 secara global [“Born Into the climate Crisis / Lahir di masa krisis iklim”](#), menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 merupakan pihak yang paling terdampak parah akibat krisis iklim ini. Secara Global, anak-anak yang lahir pada tahun 2020 akan menghadapi 7% lebih banyak kebakaran hutan, 26% lebih banyak gagal panen, 31% lebih banyak kekeringan, 30% lebih banyak banjir sungai, dan 65% lebih banyak gelombang panas jika pemanasan global dihentikan pada 1,5°C.

Sementara itu dalam permasalahan diskriminasi gender, Save the Children juga menyoroti bahwa diskriminasi gender seringnya dimulai dari masa kanak-kanak. Anak perempuan cenderung hak-haknya ditolak, tidak bersekolah, dipaksa menikah dan menjadi subjek kekerasan. Lebih lanjut, suara mereka tidak dihargai bahkan tidak didengar sama sekali.

“Sebagian besar kebijakan pemerintah berdampak langsung atau tidak langsung pada kehidupan anak dan orang muda, namun kebijakan itu seringkali diambil dan dijalankan tanpa memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak dan orang muda”
Jelas Putri Gayatri / 22 tahun / Ketua Dewan Penasihat anak dan orang muda - Children & Youth Advisory Network – Save the Children Indonesia.

Selain itu Putri menegaskan “Kegagalan dalam mendengar dapat membuat pengambilan keputusan yang salah, oleh sebab itu libatkan dan dengarkan kami. kami siap bekerja sama untuk mencapai pemulihan yang inklusif dan

lebih kuat.”

Melalui Side Event ini, Save the Children dan organisasi sipil global mengharapkan agar para pemimpin dunia khususnya pemimpin Group 20 (G20) dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi dampak berbagai persoalan yang menempatkan anak – anak dan orang muda pada risiko yang sangat tinggi.

“Kami sebagai perwakilan dari organisasi sipil global khususnya yang berfokus pada upaya pemenuhan hak – hak anak berharap agar para pemimpin dunia dapat mendengarkan dan melibatkan anak – anak dalam dialog pengambilan keputusan serta memprioritaskan kepentingan anak pada agenda G20.” Tegas Selina Patta Sumbung – CEO Save the Children Indonesia.

WG Story

Save the Children Indonesia Hosted A Side Event of the C20 Kick-off Meeting: The Call to Global Leaders About the Children's Future At Risk

Bali, 8th of March 2022 - Civil 20 (C20), one of the G20 engagement groups, held a kick-off meeting on the 7th of March at Bali. As the member on C20, Save the Children had initiated a side event to highlight the urgency of the problems and risks facing children around the world. C20 is a space for stakeholders to participate in voicing priority issues that need to be taken seriously.

"Today, children and young people around the world are faced with global threats including COVID-19, climate crisis, war and conflict, and livelihood crises. This threat presents a big risk for the future and the sustainable Earth so that children can live safely, comfortably and have their rights fulfilled. For this reason, it is important to call for this to be a priority in the G20 discussions" explained by Selina Patta Sumbung – CEO of Save the Children Indonesia.

In 2022, as the recipient of the Group 20 (G20) Presidency, the Government of Indonesia seeks to build understanding among G20 leaders regarding various issues facing the global community in order to recover together and stronger, which is in line with the main theme of this year's G20 presidency, "Recover Together, Recover Stronger".

C20 is a forum for civil society organisations around the world to bridge the global civil community movement to G20 policy and decision makers. C20 seeks to voice issues of civil society, one of which is about Education, Digitalization, and Public Space (Education, Digitalisation, and Civic Space).

A C20 side event that organised by Save the Children, had brought up important issues that need attention by all parties and G20

Leaders, including 1) The issue of gender-based violence, one of which is marked by child marriage; 2) The issue of child protection in the online realm where due to the pandemic, children are exposed to the digital and online world; 3) The problem of access to vaccines, not only the COVID-19 vaccine, but also the disruption of the implementation of regular vaccinations; 4) Climate crisis and child resilience; and 5) The issue of gender equality in children and the need for adaptive social protection.

Data and facts that strengthen these problems have been stated by various parties, such as: UNICEF (2020) states that every year, 12 million girls get married before they are 18 years old. It was further stated that 21% of young women were married before their 18th birthday. The DQ (Digital Quotient) Institute (2020) found that globally children aged 8-12 years are experiencing a problem called a cyber pandemic. There are 60% of children 8-12 years old who are exposed to the risks of the digital world including meeting strangers or experiencing sexual harassment, violence or pornography content, threats, social media interference, cyber-bullying, and reputational risks.

In the health sector, the data also shows a blurry picture. According to WHO and UNICEF, the coverage of regular childhood vaccinations has decreased from 86% in 2019, to 83% in 2020. It is estimated that 23 million children under one year of age do not receive standard vaccines. This figure is the highest since 2009. By 2020, the number of children who were not vaccinated at all increased to 3.4 million.

In the context of the climate crisis, Save the Children's latest 2021 global report "[Born into](#)

the Climate Crisis", illustrates that children born in 2020 are the most severely affected by this climate crisis. Globally, children born in 2020 will face 7% more forest fires, 26% more crop failures, 31% more droughts, 30% more river flooding and 65% more heat waves if global warming stopped at 1.5°C.

Meanwhile, on the issue of gender discrimination, Save the Children also highlighted that gender discrimination often starts from childhood. Girls tend to have their rights denied, not in school, forced into marriage and subject to violence. Furthermore, their voices are not appreciated or even heard at all.

"Most government policies have a direct or indirect impact on the lives of children and young people, but these policies are often taken and implemented without paying attention to what is really needed by children and young people" explained by Putri Gayatri / 22 years old / Chair of the Advisory Board for Children and Young People - Children & Youth Advisory Network – Save the Children Indonesia

In addition, Putri emphasised, "Failure to listen can lead to wrong decision making, so get involved and listen to us. we stand ready to work together to achieve an inclusive and stronger recovery." Through this side event, Save the Children and global civil society organisations hoped that world leaders, especially Group 20 (G20) leaders, can immediately take concrete steps to address the impact of various problems that place children and young people at very high risk.

"We as representatives of global civil organisations, especially those that focus on efforts to fulfill children's rights, hope that world leaders can listen to and involve children in decision-making dialogue and prioritise the interests of children on the G20 agenda." says Selina Patta Sumbung – CEO of Save the Children Indonesia



McKinsey & Company



Mercy Corps Indonesia



Knowledge grows